

EDUKASI PENGELOLAAN BASIS DATA DALAM PELAKSANAAN
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
(Studi di Desa Sumberejo Kecamatan Pabelan
Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Program Studi Diploma IV Pertanahan Konsentrasi Manajemen



Disusun Oleh:

REMON NAOHAN
NIT. 14232860/M

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2018

ABSTRACT

The target of Complete Systematic Land Registration (PTSL) is quite large, encouraging the Land Office of Semarang Regency to make various innovations in order to meet the realization of the target achievement. One such innovation is to empower the community through education of database management to the community who become the participant of PTSL program. This database is created or designed by the Land Office of Semarang Regency, then this data base is filled or completed by the community who previously conducted training and socialization first. Researchers are interested to know the implementation process of education of land database management in the implementation of this PTSL and what changes occur in the educational community after the education process.

This research uses descriptive method with qualitative approach. Through descriptive-qualitative research methods, researchers collect data relating to research problems. Data were obtained by direct observation and interviews and documentation review. The location of this research was conducted in Sumberejo Village, Pabelan Subdistrict, Semarang Regency, Central Java Province. In this village has not done educational activity of database management. In addition, this village is also a participant of PTSL 2018 with a target of 2,533 parcels of land.

Researchers are directly involved and participate in this educational process. The educational process is done in Sumberejo Village Office, with the number of educational participants amounted to 9 people. The education process implemented in Desa Sumberejo runs well. This is seen from the public's enthusiasm and positive response from the participants of education. After the educational process, there has been a change of perspective on the Sumberejo villagers to the management of the land database. This activity was previously considered complicated and very troublesome, but after education is considered easy to do. In addition, there was a change of action in the Sumberejo Village community. This change of action is evident from the implementation of database management activities that were previously done manually after the educational activities turned into the management of the land database is done digitally.

Keywords : Education, Community Empowerment, PTSL

D A F T A R I S I

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Lembar Pengesahan	ii
Pernyataan Keaslian Skripsi	iii
Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstract	viii
Intisari	ix
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar.....	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Kerangka Teoritik	6
1. Pendaftaran Tanah Sitematis Lengkap (PTSL)	6
a. Pendaftaran Tanah di Indonesia	6
b. Pendaftaran Tanah Sitematis Lengkap (PTSL)	9
c. Pengumpulan Data Fisik	13
d. Pengumpulan Data Yuridis	17
e. Partisipasi Masyarakat dan Pentingnya Edukasi untuk Meningkatkan Peran Aktif Masyarakat	18
2. Edukasi	21
a. Pengertian Edukasi	21
b. Sosiologi Pendidikan	22
c. Pendidikan dalam Perspektif Struktural Fungsional ..	24
3. Fungsi Edukasi	30
4. Basis Data	33
B. Kerangka Pemikiran	35
BAB III : METODE PENELITIAN	37
A. Format Penelitian	37

	B. Lokasi Penelitian	38
	C. Teknik Penetapan Informan	38
	D. Jenis Data yang Diperoleh	39
	E. Teknik Pengumpulan Data	40
	F. Teknik Analisis Data	42
	G. Perencanaan Waktu Penelitian	45
BAB IV	: GAMBARAN UMUM DESA SUMBEREJO.....	47
	A. Kondisi Geografis Desa.....	47
	B. Pemerintahan dan Prasarana.....	51
	C. Pemerintahan dan Prasarana.....	52
BAB V	: PROSES EDUKASI	55
	A. Membangun Basis Data	55
	1. Latar Belakang Pembangunan Basis Data	55
	2. Penyusunan Basis Data	58
	3. Capaian Pelaksanaan Kegiatan PTSL Tahun 2017.....	62
	B. Urgensi Edukasi	63
	C. Pelaksanaan Edukasi	65
	D. Kendala Pelaksanaan Edukasi	70
	1. Kendala pada Proses Pelaksanaan Edukasi.....	70
	2. Kendala pada Penyampaian Materi Edukasi	70
	3. Kendala pada Partisipan yang Diedukasi	71
BAB VI	: PERUBAHAN PASCA EDUKASI	72
	A. Terbentuknya Modal Sosial.....	72
	B. Perubahan Cara Pandang	74
	C. Perubahan Tindakan	75
BAB VII	: PENUTUP	78
	A. Kesimpulan	78
	B. Saran	79
	DAFTAR PUSTAKA	81
	LAMPIRAN	85
	RIWAYAT HIDUP PENULIS	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah dalam rangka mewujudkan kehadiran Negara di bidang pertanahan dengan memberikan jaminan kepastian hukum Hak Atas Tanah sebagai bukti hak kepemilikan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA), pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Oleh karena itu pemerintah merasa perlu untuk melakukan percepatan pendaftaran tanah untuk mengejar persentase tanah terdaftar. Salah satu cara yang ditempuh Kementerian Agraria dan Tata Ruang adalah melalui program Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Target dari kegiatan ini bukanlah target yang sedikit. Tahun 2017 Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) / BPN menargetkan 5 (lima) juta bidang, kemudian pada tahun 2018 direncanakan akan meningkat menjadi 7 (tujuh) juta bidang dan pada tahun 2019 sebesar 9 (sembilan) juta bidang. Pemerintah mencanangkan program ini sebagai bagian dari upaya reforma agraria yang merupakan salah satu Nawacita Pemerintahan Jokowi-JK. Hal ini dianggap sangat mendesak karena melihat fakta bahwa di Indonesia seharusnya ada 126 juta sertifikat yang dimiliki rakyat namun masih mencapi jumlah 46 juta sertifikat (Santoso, 2017: 1). Untuk itulah pemerintah dan Kementrian ATR/BPN terus menerus mendorong terwujudnya pelaksanaan kegiatan percepatan ini.

Berbagai kebijakan bahkan inovasi-inovasi kemudian dibuat untuk dapat mengakomodir kegiatan percepatan tersebut. Segala daya dan upaya dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN khususnya kantor-kantor pertanahan di seluruh Kabupaten / Kota di Indonesia. Seluruh sumber daya baik manusia maupun materil yang ada kemudian difokuskan untuk mengerjakan PTSL. Tidak terkecuali juga yang terjadi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, dimana Kantor Pertanahan ini memiliki target terbesar di Provinsi Jawa Tengah yaitu 50.000 bidang tanah. Tahap pertama target progrma PTSL di Kantor Pertanahan ini adalah sebesar 20.000 bidang dengan realisasi pencapaian sebesar 100 % (persen), kemudian tahap kedua dengan target 30.000 bidang dengan realisasi pencapaian sebesar 63.6% (persen).¹

Ketika dihadapkan pada target yang cukup besar bukan tidak mungkin kegiatan PTSL ini akan menghadapi hambatan dan kendala dalam pelaksanaannya. Namun hambatan dan kendala ini harusnya dapat menjadi tantangan bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) untuk dapat dicari bersama solusi dan pemecahannya. Menurut Heri Susanto (2017 : 6) Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, setelah digulirkan program PTSL masih mengalami berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Hambatan tersebut adalah kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM), Perbedaan pemahaman atau penafsiran PTSL antar instansi pemerintah, kurangnya partisipasi, kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah daerah, serta masyarakat yang relatif bersifat pasif terhadap kegiatan PTSL ini.

Target yang tergolong cukup besar mendorong Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang melakukan berbagai inovasi untuk dapat memenuhi realisasi pencapaian target. Salah satu inovasi tersebut adalah dengan melakukan pemberdayaan masyarakat melalui edukasi pengelolaan basis data kepada masyarakat yang menjadi peserta program PTSL. Hal ini juga dilakukan untuk

¹ Informasi diperoleh dari Sdr Zainal Arif selaku admin Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) di Kantor Peratanahan Kabupaten Semarang pada tanggal 11 Desember 2017.

menjawab tantangan pertama yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia dan tantangan keempat yaitu pasifnya masyarakat dalam pemenuhan persyaratan kegiatan PTSL. Basis data ini dibuat atau dirancang oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, kemudian basis data ini diisi atau dilengkapi oleh masyarakat yang sebelumnya dilakukan pelatihan serta sosialisasi terlebih dahulu. Edukasi atau pelatihan dilakukan kepada para pengumpul data yuridis desa atau disingkat PULDADIS. Output dari basis data ini nantinya adalah blanko pendaftaran serta kelengkapan lainnya yang terintergrasi dalam sebuah basis data sehingga mudah diprintout dan diakses sesuai kebutuhan. Basis data ini juga akan mempermudah Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang untuk *pengentryan* data pada aplikasi KKP dan proses pencetakan Sertipikat.

Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan PTSL dapat menjadi salah satu cara untuk melakukan percepatan realisasi pencapaian target. Menurut Soetomo (2011 : 218), jika masyarakat merasa dilibatkan dalalam proses perencanaan, maka mereka merasa ikut memiliki program tersebut, sehingga juga lebih merasa bertanggung jawab akan pelaksanaan dan keberhasilannya. Hal ini dapat menjawab permasalahan yang terjadi pada kantor-kantor pertanahan terkait target PTSL yang cukup besar namun kekurangan sumber daya manusia. Dengan melibatkan masyarakat sebagai tenaga pendukung kegiatan PTSL maka bukan tidak mungkin kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan realisasi pencapaian target PTSL dapat terpenuhi. Namun kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam program PTSL ini harus melalui edukasi dan sosialisasi serta koordinasi yang baik sehingga kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang Edukasi Pengelolaan Basis Data dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Sumberejo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang. Peneliti ingin melihat dan mempelajari bagaimana Kantor Petanahan Kabupaten Semarang memanfaatkan dan mengaktifkan masyarakat dalam pengelolaan basis data untuk mendukung percepatan pelaksanaan PTSL di desa tersebut. Strategi edukasi ini

juga diharapkan bisa dikembangkan untuk percepatan pelaksanaan PTSL mengingat target yang meningkat pada tahun 2018 dan strategi ini juga bisa digunakan pada Kantor-Kantor Pertanahan lainnya. Secara akademik hal ini menjadi kajian yang menarik, dimana kita dapat melihat seberapa besar partisipasi masyarakat dalam pengelolaan basis data yang kemungkinan tidak hanya digunakan untuk mendukung percepatan penyelesaian program PTSL namun juga berpotensi untuk membangun basis data pertanahan di desa untuk menghindari sengketa dan konflik pertanahan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan Edukasi Pengelolaan Basis Data Pertanahan dalam Pelaksanaan PTSL di Desa Sumberejo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang, serta kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan edukasi tersebut?
2. Perubahan apakah yang terjadi pada masyarakat peserta edukasi setelah dilakukannya proses edukasi tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui proses pelaksanaan Edukasi Pengelolaan Basis Data Pertanahan dalam Pelaksanaan PTSL di Desa Sumberejo serta kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan edukasi tersebut.
2. Mengetahui perubahan yang terjadi pada masyarakat peserta edukasi setelah dilakukannya proses edukasi.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

1. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan informasi yang bermanfaat tentang Edukasi Pengelolaan Basis Data Pertanahan dalam Pelaksanaan PTSL.

2. Sebagai saran dan masukan bagi kantor pertanahan untuk dapat mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PTSL khususnya kendala dalam kurangnya jumlah SDM dan pasifnya masyarakat dalam kegiatan PTSL.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap kegiatan edukasi pengelolaan basis data pertanahan dalam pelaksanaan PTSL di Desa Sumberejo didapat kesimpulan bahwa:

1. Proses edukasi yang dilaksanakan di Desa Sumberejo berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini disebabkan oleh adanya antusiasme masyarakat dimana staff pemerintah desa dan kepala dusun terlibat dan berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan tersebut. Bahkan Kepala Desa Sumberejo turut ikut serta dan ambil bagian di dalam kegiatan. Antusiasme ini juga dilihat dari respon partisipan pada saat diskusi. Kendala yang dihadapi dalam kegiatan ini adalah kurangnya SDM dari Kantor Pertanahan baik dari kuantitas maupun kualitas serta terbatasnya prasarana untuk melakukan proses edukasi. Materi yang disampaikan dalam proses edukasi juga dianggap oleh partisipan adalah hal yang baru sehingga diperlukan proses untuk penyesuaian kembali. Selain itu partisipan memiliki latar belakang yang tidak sama atau heterogen sehingga memiliki daya tangkap, persepsi dan daya nalar yang berbeda.
2. Pasca proses edukasi perubahan yang terjadi pada masyarakat Desa Sumberejo adalah sebagai berikut:
 - a. Terjadi perubahan cara pandang pada masyarakat Desa Sumberejo. Masyarakat Desa Sumberejo sebelum dilakukannya edukasi memandang kegiatan pengelolaan basis data pertanahan ini rumit dan sangat menyusahakan. Hal ini kemudian berubah karena setelah dilakukan edukasi, masyarakat kemudian menganggap kegiatan pengelolaan basis data itu tidak lagi menyulitkan dan sangat mudah untuk dilakukan.
 - b. Terjadi perubahan tindakan pada masyarakat Desa Sumberejo. Perubahan tindakan ini terlihat dari pelaksanaan kegiatan pengelolaan basis data

yang sebelumnya dilakukan secara manual setelah dilakukan kegiatan edukasi beralih menjadi pengelolaan basis data pertanahan yang dilakukan secara digital.

B. Saran

1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dapat menerapkan program pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan edukasi pengelolaan basis data yang diterapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang pada kantor-kantor pertanahan lain. Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang memiliki target PTSL pada tahun 2017 sebesar 50.000 bidang tanah. Berdasarkan data per tanggal 17 Desember 2017, target tersebut telah terselesaikan sebesar 41.554 bidang tanah atau sebesar 83,1 % (persen). Hal ini tentunya diharapkan dapat menjawab kendala dalam pelaksanaan PTSL, khususnya dalam hal kurangnya jumlah SDM dan membantu proses percepatan pelaksanaan PTSL. Peneliti juga membuat sebuah modul (**Lampiran 2**) yang menjelaskan secara rinci dari awal penyusunan basis data ini secara *step by step* sampai dengan petunjuk pengisiannya oleh masyarakat. Selain itu peneliti juga membuat sebuah *Term Of Reference* (**Lampiran 3**) dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan (**Lampiran 4**) sebagai rujukan untuk melaksanakan kegiatan edukasi pengelolaan basis data pertanahan dalam pelaksanaan PTSL.
2. Kegiatan edukasi pengelolaan basis data pertanahan ini dapat menjadi salah satu kegiatan pemberdayaan yang dibiayai secara resmi dan masuk kedalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Masuknya kegiatan tersebut ke dalam DIPA bertujuan agar kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik mengingat perlunya anggaran dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Perlu diadakan studi/kajian yang lebih mendalam serta keterlibatan yang lebih intensif dalam jangka waktu yang memadai untuk dapat melihat perubahan masyarakat sebelum dan sesudah proses edukasi pengelolaan basis data

pertanahan dilaksanakan. Sehingga dapat diketahui seberapa besar kegiatan edukasi ini merubah budaya atau kebiasaan masyarakat dalam pelaksanaan PTSL khususnya pada proses pengumpulan data yuridis (puldadis).

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Adi, Isbandi Rukminto. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: Dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP UI Press.
- Ardianto, Elvinaro, Q-Anees, 2007. *Filsafat Ilmu Komunikasi*. Bandung: Simbiosis Rekama Media
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang. *Kecamatan Pabelan dalam Angka 2017*. Ungaran : Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang.
- Brannen, Julia. *Mixing Methods : Qualitative and Quantitative Research*, terjemahan H. Nuktah Arfawie dkk. 2002. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Conyers, Diana. 1991. *Perencanaan Soaial di Dunia Ketiga*. Yogyakarta : UGM Press.
- Charon, Joel M. 1979. *Symbolic Interactionism*. United States of America : Prentice Hall Inc.
- Fukuyama, Francis. 2002. *Trust: Kebijakan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*. Yogyakarta: Qalam.
- Harsono, Boedi. 2008. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. cet. 12. Jakarta : Djambatan.
- Heriyanto, B. 2004. *Sistem Manajemen Basis Data*. Bandung : Penerbit Informatika.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi Kedua*. Jakarta : Erlangga.
- Janawi. 2013. *Metodologi dan Pendekatan Pembelajaran*. Yogyakarta : Ombak.
- Johnson, Doyle Paul. 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta : PT. Gramedia.

- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Malik, Zainuddin. 2010. *Sosiologi Pendidikan*, cet. 2. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Mikkelsen, Britha. 1999. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*. Penerjemah: Matheos Nalle. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nugroho, Adi, 2004. *Konsep Pengembangan System Basis Data*. Bandung : Informatika Bandung.
- Parlindungan, A.P. 1999. *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*. Bandung : Mandar Maju.
- Poloma, Margaret M. 1992. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta : Rajawali Press.
- Puspasari, Sofi dan Sutaryono. 2017. *Integrasi Agraria –Pertanahan dan Tata Ruang Menyatukan Status Tanah dan Fungsi Ruang*. Yogyakarta : STPN Press.
- Sanderson, Stephen K. 1991. *Sosiologi Makro : Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Santoso, Urip. 2012. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Jakarta : Kencana.
- Soetomo. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat Mungkinkah Muncul Antitesisnya?* Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Taneko, Soleman B. 1984. *Struktur dan Proses Sosial Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Tilar, H.A.R. 2006. *Standarisasi Pendidikan Nasional: Suatu Tinjauan Kritis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Veeger, KJ. 1985. *Realitas Sosial : Refleksi Dalam Filsafat Sosial Atas Hubungan Individu-Masyarakat Dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*. Jakarta: PT. Gramedia.

Prosiding :

- Noor, Muhammad Rukhyat, *Aspek Hukum Teknologi Digital dan Dolumentasi Pertanahan*. Yogyakarta: Disampaikan pada Seminar I *Institutional Partnership for Strentgthening Land Administration (IPSLA)*, di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta, tanggal 8 – 9 Mei 2008, hlm. 6.
- Prayitno, Raden Rudi. 2017. *Hambatan dan kendala Serta Solusi PTSL 2017 di D.I. Yogyakarta*. Yogyakarta : Prosiding Seminar Nasional Pertanahan di STPN, Desember 2017.
- Santoso, Heri. 2017. *Percepatan Pendaftaran Tanah di Indonesia : Tantangan Pelaksanaan PTSL dan Respon Solusinya*. Yogyakarta : Prosiding Seminar Nasional Pertanahan di STPN, Desember 2017.

Peraturan :

- Indonesia, Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. UU Nomor 5 tahun 1960 LN No. 104 Tahun 1960, TLN No. 2043.
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah.
- PMNA/KBPN No. 1 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (PRONA).
- PMNA/KBPN No. 4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (PRONA).
- PMNA/KBPN No. 28 Tahun 2016 tentang Percepatan Program Nasional Agraria Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis.
- PMNA/KBPN No. 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- PMNA/KBPN No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PMNA/KBPN No. 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

PMNA/KBPN No. 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Website :

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <https://kbbi.web.id/>, diakses pada tanggal 1 Maret 2018 Pukul 07.00 wib.

Sasha, 2016, *Pengertian Basis Data : Fungsi dan Tujuannya*, diakses dari <http://artikel-az.com/pengertian-basis-data/> pada tanggal 30 Maret 2018, Pukul 10.00 WIB.

<http://www.jurnalkomputer.com>, diakses tanggal 23 April 2018 pukul 09.00 WIB